

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Wilayah Papua merupakan daerah paling timur di Indonesia yang berbatasan dengan Papua Nugini. Pada tahun 1884, Irian Barat dikuasai oleh Inggris, dan pada tahun yang sama, Timur Laut Irian Barat dikuasai oleh Jerman. Perebutan kekuasaan ini baru berakhir pada 16 Mei 1895 di Den Haag dengan diadakannya pertemuan antara Belanda dan Inggris mengenai penetapan batas wilayah Papua, yang dikenal sebagai Perjanjian Den Haag. Hasil pertemuan ini merumuskan bahwa wilayah timur dan barat akan dipisah oleh sungai. Sehingga, Irian Barat menjadi kekuasaan Belanda dan Irian Timur atau dikenal sebagai Papua Nugini sebagai wilayah Inggris. Wilayah kekuasaan Kerajaan Belanda, selanjutnya dikenal sebagai *Nederlands Nieuw Guinea*. Pada tahun 1963, Belanda kembali mengubah nama Papua dari *Nieuw Guinea* menjadi *Nederlands Nieuw Guinea*. Perubahan nama tersebut lebih bersifat politis karena Belanda tak ingin kehilangan pulau Papua dari Indonesia pada zaman itu.<sup>1</sup>

*West Papua* merupakan nama yang digunakan untuk menyebut kawasan yang terletak di sebelah barat Papua Nugini atau *western half of New Guinea*.

---

<sup>1</sup>Rany Purnama Hadi, "Tantangan Keamanan Nasional Indonesia Dalam Menyikapi Transformasi Separatisme Dan Cyberprotest Di Papua," *Joint Seminar on Public and International Affairs UUM-Unair* 4, no. September (2019): 1–10.

Pemerintah Indonesia kemudian membagi wilayah *west papua* ini menjadi dua region yaitu Papua dan Papua Barat. Meski telah menjadi bagian dari pemerintahan Negara Republik Indonesia yang disepakati melalui *Act of Free Choice* pada tahun 1969, akan tetapi banyak masyarakat Papua yang merasa bukan menjadi bagian dari Indonesia dan menginginkan kemerdekaan bagi Papua.<sup>2</sup> Belanda menyerahkan wilayah tersebut kepada Indonesia pada tahun 1962 karena penyelesaian yang difasilitasi PBB tergantung pada prasyarat bahwa mandat diadakan sebelum tahun 1969.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, muncul perlawanan terhadap pemerintah Indonesia dari masyarakat Papua yang menuntut adanya kemerdekaan dari Indonesia yang berlanjut pada separatisme.

Berdasarkan Penentuan Pendapat Perorangan (PEPERA) pada 14 Juli– 2 Agustus 1969, Papua ternyata penting bagi wilayah Indonesia, yang kemudian ditegaskan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 2504 dalam pertemuan tanggal 19 November 1969, namun hasil ini tidak bisa menghilangkan perselisihan di Papua. Sejak awal Papua resmi menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Pemerintah memilih dan menggunakan pendekatan keamanan (militer) dengan dalih menegakan kedaulatan negara, mengikis habis gerakan separatisme yang telah dipupuk sebelum Belanda hengkang dari Papua. Pendekatan ini dijalankan oleh pusat untuk menangani sejumlah gerakan masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah

---

<sup>2</sup> Richard Chauvel and Ikar Bhakti, *The Papua Conflict: Jakarta's Perceptions and Policies*, Policy Studies, 2004.

<sup>3</sup> Judge Adrian Fulford et al., *Masa Lalu Yang Tak Berlalu: Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Tanah Papua Sebelum Dan Sesudah Reformasi*, 2012.

maupun perlawanan dari kelompok di Papua sejak awal menolak integrasi Papua ke Indonesia dengan jalan damai. Setelah memasuki masa reformasi, Indonesia memasuki babak baru di mana daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai bagian dari otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia yang berdasarkan asas desentralisasi,sebelum. Belanda meninggalkan Papua.

Konflik separatisme Papua memang memiliki latar belakang yang cukup rumit. Sejak tahun 1945, yakni pada awal kemerdekaan, perebutan atas wilayah Papua mulai muncul ke permukaan dengan melibatkan pemerintah Indonesia yang baru saja merdeka, dengan pihak Kerajaan Belanda.<sup>4</sup> Yang menjadi permasalahan pada masa itu adalah pihak pemerintah Indonesia menginginkan wilayah Papua menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Sedangkan pemerintah Belanda merasa masih memiliki kekuasaan di teritori tersebut dan menganggap bahwa Papua, yang dulunya bernama *Nederland Nieuw Guinea* memiliki wilayah kesatuan politik yang berbeda dengan Indonesia, dengan koneksi sejarah dan budaya yang berbeda pula dibanding kepulauan Indonesia lainnya.<sup>5</sup> Secara kultur, '*West Papua*' sendiri memang lebih dekat dengan rumpun Melanesia, atau secara geografis lebih dekat kesamaan kulturenya dengan kawasan Pasifik dan pulau-pulau kecil di sekitar kawasan Pasifik seperti Fiji, Solomon, Vanuatu, Papua Nugini dan Australia.

---

<sup>4</sup> Hadi, "Tantangan Keamanan Nasional Indonesia Dalam Menyikapi Transformasi Separatisme Dan Cyberprotest Di Papua."

<sup>5</sup> Jason Macleod, *Nonviolent Struggle In West Papua: "We Have A Hope," Nonviolent Struggle In West Papua: "We Have A Hope,"* 1998.

Pada tahun 1965 terbentuknya Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau *Free Papua Movement* yang merupakan organisasi perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Tujuan dari pembentukan organisasi ini adalah untuk mengakhiri kekuasaan Indonesia di Papua dan menjadikan Papua sebagai negara merdeka.<sup>6</sup> OPM kemudian banyak melakukan protes-protes serta upaya kemerdekaan dengan metode gerilya dimana kelompok separatis masih menggunakan senjata tradisional seperti tombak, busur dan panah. Mereka juga membentuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang terdiri dari pasukan militer yang dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern.<sup>7</sup>

Dari berbagai ancaman terhadap negara, separatisme menjadi salah satu ancaman utama bagi Indonesia karena menyangkut masalah kedaulatan wilayah. Pemisahan diri dari negara berdaulat (*secession*), pembentukan wilayah sendiri (*fragmentation*), pendirian pemerintahan otonom (*autonomy*), dan penentuan nasib sendiri (*self determination*) adalah konsep-konsep yang menjadi cakupan dari separatisme. Dalam sejarah bangsa Indonesia, gerakan separatis telah ada sejak awal kemerdekaan dan beberapa diantaranya masih eksis hingga saat ini meskipun tidak secara jelas tampak melakukan perlawanan seperti pada awal kemunculannya.<sup>8</sup>

Oleh karena adanya ancaman terhadap kedaulatan negara, gerakan separatis di Papua menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian khusus

---

<sup>6</sup> N Tebay, "Pertarungan Indonesia versus Papua," Tempo.co, 2016.

<sup>7</sup> Hadi, "Tantangan Keamanan Nasional Indonesia Dalam Menyikapi Transformasi Separatisme Dan Cyberprotest Di Papua."

<sup>8</sup> Ahmad Sabir, "Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Vanuatu Dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua," *Jurnal Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2018): 91.

pemerintah Indonesia. Gerakan ini menghendaki pemisahan wilayah Papua yang saat ini terbagi menjadi dua provinsi—Papua dan Papua Barat. Penyebab berkembangnya gerakan ini adalah kekecewaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat dalam menangani berbagai permasalahan di Papua. Isu separatisme Papua merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi Indonesia saat ini. Dalam sejarah separatisme di Indonesia, konflik dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan konflik terbesar yang pernah dihadapi Indonesia.<sup>9</sup> Pergerakan OPM yang sebelumnya terpecah-pecah dalam berbagai faksi perlawanan kini semakin terkonsolidasi, solid, dan rapih<sup>10</sup>. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam meredam gerakan separatis Papua yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>11</sup>

Dalam rangka mempertahankan dan menjaga keutuhan NKRI, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, khususnya yang berkenaan dengan pengkondisian di wilayah Papua yang kemudian diikuti dengan berbagai tindakan penegakan dalam bentuk melakukan operasi-operasi keamanan yang bertujuan untuk menumpas gerakan separatisme di Papua. Berbagai bentuk tindakan operasi tersebut, telah menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh para korban yang justru tidak ada kaitannya dengan kegiatan separatis.

---

<sup>9</sup> Irfa Puspitasari, “Indonesia’s New Foreign Policy- ‘Thousand Friendszero Enemy,’” 2010, 1–6.

<sup>10</sup> Tebay, “Pertarungan Indonesia versus Papua.”

<sup>11</sup> Sabir, “Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Vanuatu Dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua.”

Aparat keamanan dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk dapat melakukan kegiatan operasi keamanan dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia, akan tetapi dalam praktiknya ditemukan adanya berbagai penyimpangan yang berdampak pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, salah satu pelanggaran yang terjadi yaitu pembunuhan terhadap Theys Eluay yang dimana Theys Eluay adalah tokoh adat Papua yang juga Ketua Presidium Dewan Papua pertama kali yang diungkap setelah pernyataan Kapolda Papua, Irjen (pol) Made Mangku Prastika di Mabes Polri, pada tanggal 15 Januari 2002 bahwa adanya dugaan keterlibatan aparat, setelah menganalisis keteranganterdapat 60 saksi yang telah di periksa termasuk 7 orang aparat. Pembunuhan Theys Eluay dengan cara yang tidak wajar justru mendatangkan tekanan dari pegiat HAM maupun pemerintah internasional, termasuk masyarakat Papua pada umumnya sampai saat ini.<sup>12</sup> Selain itu, banyak pula temuan-temuan pelanggaran HAM yang bahkan meningkat paska reformasi, terutama dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Perhatian internasional terhadap HAM semakin meningkat seiring meningkatnya peranan kelompok-kelompok pembela HAM. Bersama-sama dengan terjadinya keterbukaan dan kebebasan untuk memperoleh informasi, menjadi semakin sulit bagi negara untuk mengisolasi isu pelanggaran HAM semata-mata sebagai masalah internal.<sup>13</sup> Dukungan internasional kepada kelompok prokemerdekaan di Papua menimbulkan kompleksitas yang cukup serius bagi

---

<sup>12</sup> Natalius Pigai, "Solusi Damai Di Tanah Papua (Mengubur Tragedi Ham Dan Mencari Jalan Kedamaian)," *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2014): 23–38.

<sup>13</sup> Rein Mullerson, *Human Right Diplomacy* (New York: Routledge, 1997).

Pemerintah Indonesia dalam berdiplomasi dengan pihak luar negeri. Posisi Indonesia menjadi lemah ketika berhadapan dengan persoalan demokratisasi, HAM dan lingkungan di Papua, hal ini dikarenakan isu-isu tersebut merupakan agenda global yang kerap dipakai untuk mengukur ataupun menilai tingkat keberhasilan ataupun kegagalan sebuah pemerintah di negara-negara berkembang. Bagi kelompok promerdeka, khususnya OPM, agenda global tersebut menjadi isu-isu strategis yang sangat menguntungkan bagi posisi atau perjuangan mereka di forum internasional.<sup>14</sup>

Gagasan utama menginternasionalisasi Papua adalah salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam Kongres Rakyat Papua II, yakni pembentukan sebuah tim untuk melobi masyarakat internasional, termasuk meminta bantuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DKPBB) dalam kaitannya dengan peran DKPBB sebagai penjaga ketertiban dan perdamaian dunia, termasuk untuk imenjaga/memelihara keamanan di Papua sampai terbentuk pemerintahan yang tetap. Selain itu, kongres juga meminta PDP melakukan dialog dengan Indonesia, Belanda, Amerika Serikat (AS) dan PBB. Lobi secara bilateral kemudian ditindaklanjuti di forum regional dan internasional, seperti di PBB dan Forum Negara Pasifik untuk memperoleh dukungan secara terbuka. Dukungan ini merupakan *second voice* untuk memudahkan upaya menggalang simpati internasional melalui perwakilan negara asing yang mendukung kemerdekaan Papua. Beberapa isu yang biasanya diangkat dalam forum regional/internasional adalah sejarah politik Papua,

---

<sup>14</sup> Adriana Elisabeth, "Dimensi Internasional Kasus Papua," *Jurnal Penelitian Politik* 3, no. 1 (2020): 43–65.

keabsahan Pepera, masalah HAM, peran dan dominasi militer Indonesia, ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat Papua, diskriminasi rasial (ras Melanesia) dan kerusakan lingkungan.

Australia dalam kasus Papua sangat penting karena Australia mempunyai pengaruh politik di kalangan negara-negara Pasifik Selatan. Selain itu, Australia juga cukup berperan dalam pembangunan di Indonesia, terutama melalui program bantuan berupa hibah kepada Indonesia meliputi berbagai sektor. Dalam kaitan dengan penanganan kasus Papua, hubungan bilateral Indonesia-Australia tidak hanya bertujuan untuk menghadapi sikap dan reaksi negara-negara Pasifik Selatan dalam kasus Papua yang secara tegas, beberapa negara sudah memberikan dukungan mereka pada gerakan kemerdekaan Papua, namun juga untuk meredam dukungan LSM Australia yang juga secara lugas mendukung kelompok promerdeka di Papua.

Sedangkan kelompok pendukung Papua Merdeka diantaranya yaitu Nauru dimana pada hal ini pemerintah Nauru secara tegas mendukung kemerdekaan Papua. Hal ini disampaikan dalam KTT Forum Pasifik Selatan di Kiribati, Oktober 2000. Selain itu, Nauru juga mendukung resolusi PBB mengenai penentuan nasib bagi rakyat Papua Barat. Sebelumnya, Bernard Dowiyogo M.P. (Presiden Republik Nauru) dalam Millenium Summit PBB yang diselenggarakan pada September 2000, mengemukakan mengenai kemerdekaan Papua dan menganggap bahwa selama ini Papua berada di bawah dominasi penjajah dan kontrol luar negeri. Namun pernyataan tersebut ini tidak langsung merujuk pada Indonesia. Selain Nauru yang mendukung kemerdekaan Papua, negara lain yang mendukung Papua juga yaitu Vanuatu,



pemerintah Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua Barat. Argumentasi Pemerintah Vanuatu tak jauh berbeda dari Nauru, yaitu karena faktor-faktor sejarah dan kedekatan secara geografis. Di Vanuatu terdapat kantor perwakilan rakyat Papua Barat, yang diketuai oleh Dr. John Ondowame, kemudian pemerintah Vanuatu mempunyai komitmen untuk mempromosikan identitas dan hak dasar Ras Melanesia di wilayah Asia-Pasifik, khususnya bagi Papua Barat, pemerintah Vanuatu juga mendorong dibukanya kasus-kasus ketidakadilan yang selama ini terjadi di Papua, dan memperjuangkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua.

Respon pemerintah dalam isu kasus Papua yaitu, pemerintah melakukan suatu pendekatan dalam pengelolaan konflik Papua juga mengalami perubahan antara sebelum dan sesudah era reformasi. Pada masa orde baru, pemerintah lebih banyak menekankan pendekatan represif dengan menjadikan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM) sambil menerapkan kebijakan pembangunan yang bersifat kapitalistis. Sementara pada masa reformasi, pemerintah mulai melakukan pendekatan akomodasi untuk memperoleh dukungan rakyat Papua.<sup>15</sup>

Jatuhnya Suharto pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami proses yang disebut dengan reformasi dimana pada masa reformasi berlangsung, Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan demokrasi dan otonomi daerah, serta untuk mempromosikan dan melindungi HAM sebagai prioritas sosial. Pada masa jatuhnya Suharto kegembiraan datang kepada masyarakat Papua Barat. Karena pada masa

---

<sup>15</sup> M. Sofyan Pulungan, "Dinamika Konflik Di Papua Pasca Orde Baru," *Hukum Dan Pembangunan* 4 (2003): 516–40.

Suharto selama tiga dekade kebijakan yang dibuat olehnya memicu kebencian orang Papua Barat terhadap pemerintahan Indonesia. Perselisihan yang berlangsung selama lebih dari satu dekade, Papua Nugini Belanda dipindahkan ke Indonesia berdasarkan Perjanjian New York tahun 1962. Dimana dalam perjanjian tersebut menetapkan bahwa sebuah proses di bawah pengawasan PBB untuk dapat memberikan orang-orang di wilayah tersebut mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan kebebasan dalam memilih dengan cara memastikan kehendak mereka.<sup>16</sup>

Namun pada aturan yang dibuat oleh rezim Suharto mengakibatkan sering terjadinya bentrokan antara pasukan keamanan Indonesia dengan pejuang Papua Barat. Setelah terjadinya transformasi politik nasional Indonesia pada masa reformasi era Soeharto termasuk prosesi pergantian kepemimpinan yang cepat serta gangguan lainnya, membuat Indonesia tunduk pada referendum kemerdekaan yang disponsori oleh PBB. Ini membuka peluang demokrasi bagi orang Papua Barat dalam mengejar penentuan nasib sendiri, dimana didorong oleh konsesi dari presiden Indonesia Gusdur. Pada tahun 1999 pihak berwenang Indonesia menekan kegiatan pro-kemerdekaan, dan Gusdur digantikan oleh presiden Megawati, yang dimana menyatakan bahwa Indonesia tanpa Papua Barat tidak lengkap. Pada masa ini kepemimpinan presidium segera dihancurkan, beberapa anggota ditangkap dan yang lain diganggu. Ketua They Eluay yang berasal dari kongres sebagai pemimpin Papua Barat yang kredibel dibunuh oleh perwira pasukan khusus kopasus Indonesia

---

<sup>16</sup> Johnny Blades, "West Papua: The Issue That Won'T Go Away for Melanesia," in *Lowy Institute*, 2020.

pada bulan September 2001. Dalam kejadian itu hanya sedikit masyarakat Papua yang berani untuk menyuarakan aspirasi untuk kemerdekaan didepan umum.

Pertambangan yang diambil alih oleh perusahaan AS sejak awal pemerintahan Indonesia mengakibatkan keluhan bagi penduduk asli Papua Barat, dimana penghasilan utama bagi mereka telah diambil alih oleh negara lain. Komunitas pemilik tanah setempat telah terpinggirkan dan mengklaim bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat yang memadai dari memiliki salah satu tambang emas terbesar di planet yang ada di tanah mereka sendiri. Akibatnya, tambang menjadi sasaran konflik kekerasan di Papua Barat dan militer serta polisi berebut kontrak yang menguntungkan untuk memberikan sebuah keamanan bagi operasi Freeport. Pada masa pemerintahan SBY, membuka wilayah pembangunan ekonomi, dimana SBY membangun jaringan transportasi dan meningkatkan akses listrik yang telah membantu mengubah kota-kota di Papua Barat.

Proses yang sudah dikerjakan oleh SBY dilanjutkan pada masa pemerintahan Jokowi dimana Jokowi membuat langkah awal yang positif yaitu membebaskan beberapa tahanan politik Papua Barat dan mengumumkan bahwa pembatasan akses jurnalis asing ke Papua Barat akan dicabut, meskipun itu belum sepenuhnya terwujud. Demonstrasi dan protes yang dilakukan oleh masyarakat Papua terhadap prokemerdekaan terjadi pada setiap tahunnya dimana melihat sejumlah besar orang Papua Barat memobilisasi. Pada bulan Agustus 2019, serangkaian protes yang cepat dan terbesar dan dilakukan selama bertahun-tahun di Papua Barat dipicu oleh pelecehan rasis terhadap mahasiswa Papua, satu bulan berlalu protes memicu

kerusuhan besar dimana banyak kematian yang terjadi. Oleh sebab itu, setelah masa reformasi berlangsung lama, diadakannya pemilu di Papua agar ada yang mengatur wilayah tersebut, dan meringkankan konflik yang ada dengan keputusan kepala daerah.

Keputusan kepala daerah merupakan instrumen untuk memperluas kepentingan individu dalam proses kekuasaan mayoritas. Selain itu, sistem yang paling banyak digunakan adalah suara didalam suatu lingkungan, sehingga salah satu tujuan diadakannya pemilihan kepala daerah adalah untuk membentengi otentisitas pemerintahan kerakyatan. Akibatnya, perebutan kepala daerah secara politik secara keseluruhan dapat memberikan keinginan kepada individu bahwa dengan memilih kepala daerah sendiri mereka dapat hidup lebih sejahtera. Namun, setelah beberapa waktu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten secara umum tidak berjalan seperti yang diharapkan dan selalu ada persoalan yang mengiringinya. Berbagai persoalan dalam pelaksanaan adu kepala teritorial yang secara konsisten menimbulkan pertikaian, kekeliruan antara asumsi dan kenyataan di lapangan. Akibatnya, perebutan jabatan politik kepala daerah secara keseluruhan di wilayah Papua kemungkinan besar akan terus dibayangi oleh perjuangan, baik konten datar maupun vertikal, yang telah menelan banyak korban, baik harta benda maupun nyawa. Seperti yang diungkapkan oleh pimpinan legislatif Papua, korban jiwa yang

berjatuhan dalam perebutan pilkada secara keseluruhan lebih banyak dari dampak perkembangan peristiwa.<sup>17</sup>

Indonesia sebenarnya sudah cukup lama menyadari kecenderungan Vanuatu untuk mendukung kemerdekaan Papua. Namun, baru beberapa tahun terakhir Indonesia menanggapinya secara serius, seiring semakin vokalnya Vanuatu di berbagai forum internasional serta semakin terinternasionalisasinya isu separatisme. Indonesia lantas mulai melakukan pendekatan dengan Vanuatu, salah satunya melalui diplomasi publik dengan memanfaatkan instrumen kerja sama ekonomi, teknologi, pelatihan, beasiswa, pembangunan, pertanian, peternakan dan lain-lain.<sup>18</sup> Indonesia juga memberikan bantuan luar negeri senilai USD 2 juta ketika Vanuatu terkena dampak yang cukup parah dari Badai Pam Pam (*Cylone Pam*) yang menerpa negara-negara di kawasan Pasifik. Dengan segala bantuan yang sudah diberikan oleh Indonesia kepada Vanuatu, akan tetapi sikap politik Vanuatu baik pada tataran pemerintahan, elit politik, maupun masyarakat masih menunjukkan kecenderungan untuk mendukung upaya kemerdekaan Papua. Pemerintah Vanuatu dalam sejumlah forum baik di tingkat regional seperti forum MSG dan Pacific Island Forum (PIF)

---

<sup>17</sup> Yosin Kogoya and Achmad Nurmandi, "Konflik Politik Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Puncak, Papua Tahun 2011-2012)," *Journal Of Governance and Public Policy* 2, no. 1 (2015).

<sup>18</sup> Direktorat Informasi, Direktorat Jendral Informasi Dan Diplomasi Dan Media, and Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Publik, "Diplomasi Indonesia 2014," in *Diplomasi Indonesia 2014* (Jakarta, 2015).

maupun forum internasional seperti sidang umum PBB, masih mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua yang menyudutkan Indonesia.<sup>19</sup>

Perhatian internasional terhadap isu-isu HAM tumbuh karena pemerintah disuatu negara seringkali terlibat didalam pelanggaran-pelanggaran berat HAM. Salah satu yang menjadi titik berat di pemerintah Indonesia yaitu terjadinya suatu konflik yang ada di Papua. Suatu permasalahan di Papua hingga kini belum menemukan penyelesaiannya, dimana sudah hampir 32 tahun lamanya, konflik yang terjadi di Papua masih saja menjadi isu yang diperhatikan. Keluhan West Papua dengan pemerintahan di Indonesia, termasuk sebuah pelanggaran hak asasi manusia, dimana militerisasi dan frustrasi tentang penentuan nasib sendiri telah menarik banyak perhatian khususnya perhatian didalam lingkup internasional yang semakin meningkat.

Perhatian internasional terhadap kasus HAM yang terjadi di Papua semakin hari semakin meningkat dengan seiring berjalannya waktu. Peningkatan kasus konflik yang ada di Papua ini meningkat karena adanya peran kelompok-kelompok pembela HAM seperti Asia Watch, Human Right Watch, dan Tapol pada dekade tahun 1990an. Bersama-sama dengan terjadinya keterbukaan dan kebebasan untuk dapat memperoleh suatu informasi, dimana hal ini menjadikan negara semakin sulit untuk dapat mengisolasi isu pelanggaran HAM.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sabir, "Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Vanuatu Dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua."

<sup>20</sup> Sukawarsini Djelantik, "Diploma Hak Asasi Manusia: Tantangan Bagi Indonesia," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 4 (2006), <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=a&id=96579>.

Fenomena pada penelitian ini yaitu bahwa polemik di Papua pasca reformasi mengalami peningkatan, dimana berdasarkan Setara Institute pada tahun 2016, terjadi peningkatan pelanggaran HAM di Papua yang sangat signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam organisasi Presiden Joko Widodo, ia dianggap telah fokus pada perbaikan kerangka kerja, namun telah melakukan kebebasan bersama dan perlakuan terhadap perjuangan sosial-politik. Selama rentang waktu perubahan, Papua secara teratur dianggap sebagai wilayah yang mendapat sedikit pertimbangan. Memang, Papua menyerahkan berbagai aset tetap yang menjadi sumber gaji negara. Selama rentang waktu perubahan, berbagai perubahan benar-benar telah dilakukan. Perubahan UUD 1945 yang memerintahkan kemerdekaan teritorial memberikan keunggulan tersendiri bagi Papua. Bagaimanapun, masih terdapat berbagai persoalan, yang terutama diidentikkan dengan pelanggaran kebebasan umum yang masih terjadi saat ini, kasus terberat adalah kasus Biak Numfor pada Juli 1998, episode Wasior pada 2001, kejadian Wamena pada 2003. Kejadian Paniai pada tahun 2014 dan Mapenduma pada bulan Desember 2016.<sup>21</sup>

Tindakan pelanggaran kebebasan dasar masih merupakan hal yang wajar di Indonesia, baik pada masa pra-perubahan maupun pasca-perubahan, dari fenomena diatas bahwa masih banyaknya kasus pelanggaran HAM yang mengakibatkan perpecahan di Papua dalam menuntut kebebasan terhadap HAM, kurang perdulinya pemerintah Indonesia terhadap kasus pelanggaran HAM di Papua membuat konflik

---

<sup>21</sup> Kompas.com, "Konflik Dan Pelanggaran HAM Catatan Kelam 20 Tahun Reformasi," *Kompas.Com*, 2018.

semakin rumit. Pengesahan kebebasan dasar di Papua tidak terlepas dari belenggu pertikaian dan kebiadaban yang terjadi pada tahun 1963. Pertikaian dan kekejaman yang terjadi di Papua telah mendorong beberapa pelanggaran kebebasan dasar yang merambah jauh. Tingkat kekejaman yang disertai dengan pelanggaran kebebasan dasar mendorong munculnya kehadiran orang Papua, termasuk kompromi yang menyeluruh. Pelanggaran kebebasan dasar terjadi antara legislatif Indonesia dan Papua menghadapi perjuangan terus menerus. Oleh karena itu, banyak aktivis dan asosiasi daerah dari Papua yang perlu melakukan perubahan terhadap negara Papua, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang juga ingin membebaskan Papua dari Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Isu HAM merupakan isu yang menonjol dari negara-negara yang vokal menyuarakan kemerdekaan Papua dalam internasionalisasi kasus Papua. Sehingga, penting untuk mengkaji sejauh mana respons Indonesia terhadap isu HAM yang diangkat dalam internasionalisasi kasus Papua. Pembatasan masalah dan fokus penelitian dalam skripsi ini terbatas pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dimulai dari tahun 2014 hingga saat ini. Sehingga pertanyaan penelitian penulis ialah:

Bagaimana respon pemerintah Indonesia terhadap isu HAM dalam internasionalisasi Kasus Papua Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo?



### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon Indonesia terhadap isu HAM dalam internasionalisasi Kasus Papua Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi Indonesia, terutama dalam konteks Hak Asasi Manusia di Papua.
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan menjadi acuan pemerintah dalam menganalisis isu HAM dalam internasionalisasi kasus Papua.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan pada tugas akhir ini. Penjelasan di sub bab ini akan menerangkan masing-masing bab mengenai bagaimana penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

**BAB I:** Materi yang dibahas dalam bab ini membahas tentang perhatian internasional terhadap kasus Papua, perkembangan isu-isu konflik Papua pada era pemerintahan presiden Jokowi, pelanggaran HAM di Papua dan respon Indonesia terhadap isu konflik di Papua.

**BAB II:** Materi yang dibahas dalam bab ini ialah tinjauan-tinjauan atau *literature review* mengenai isu-isu HAM atau kasus-kasus HAM di Papua dan teori dan konsep yang relevan dengan topik.

**BAB III:** Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan case study. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui metode pengamatan dengan menggunakan data sekunder yaitu seperti jurnal ilmiah, buku, dan referensi lainnya.

**BAB IV:** Bagian ini memaparkan mengenai hasil penelitian penulis yaitu kasus-kasus HAM dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo, respons negara-negara seperti Vanuatu, Nauru, dan Australia terhadap ‘West Papua’, serta respons Indonesia kepada negara-negara tersebut yang dianalisis menggunakan konsep Diplomasi, Keamanan Nasional, dan Keamanan Manusia.

**BAB V:** Bagian ini menyimpulkan hasil penelitian penulis atas respon Indonesia terhadap internasionalisasi kasus Papua pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo.